

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, S., Muin, S., & Oramahi, H. A. (2016). Sikap masyarakat terhadap penetapan areal kerja hutan desa di Desa Nanga Betung Kecamatan Boyan Tanjung Kabupaten Kapuas Hulu. *Jurnal Hutan Lestari*, 4(2).
- Agusti, T. M., Nurjaya, I. N., & Koeswahyono, I. (2019). Implementasi regulasi perhutanan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar hutan. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 4(2), 300-309.
- Akbar, S. (2018). Analisa Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan. *Jiaganis*, 3(1).
- Andayani, I., & Tirtayasa, S. (2019). Pengaruh kepemimpinan, budaya organisasi, dan motivasi terhadap kinerja pegawai. *Maneggio: Jurnal Ilmiah Magister Manajemen*, 2(1), 45-54.
- Apriandana, F., Safe'i, R., Febryano, I. G., & Kaskoyo, H. (2021). Kinerja lembaga pengelola hutan Desa Muara Danau Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. *Ulin Jurnal Hutan Tropis*, 5(1), 17-27.
- Ahada, N., & Zuhri, A. F. (2020). Menjaga Kelestarian Hutan Dan Sikap Cinta Lingkungan Bagi Peserta Didik Mi/Sd Di Indonesia. *El Banar: Jurnal Pendidikan Dan Pengajaran*, 3(1), 35-46.
- Burhan, Z. (2016). Efektivitas Bantuan Pembangunan Internasional dalam Program Sulawesi Agfor (*Agroforestry & Forestry*) Project terhadap Pemberdayaan Hutan Desa Campaga Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Indonesia*, 1(3), 63-73.
- Farhaeni, M., & Ardhana, I. P. G. (2018) . Pemberdayaan masyarakat dalam menunjang pembangunan ekowisata di kawasan hutan desa. In *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Biologi* (Vol. 1, No. 1, pp. 722-729).
- Hadi, H. (2018). Analisis Dampak Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (Hkm) Di Desa Sapit Kecamatan Suela Kabupaten Lombok Timur. *Geodika: Jurnal Kajian Ilmu dan Pendidikan Geografi*, 2(1), 9-21.
- Leroux, Y. A. (2016). Peralihan Pengelolaan Tanah Kawasan hutan kemasyarakatan dan Implikasi Hukumnya (studi di Kecamatan Batuk liang Utara kabupaten Lombok Tengah). *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 4(3), 526-537.
- Mala, J. A., Sambiran, S., & Kumayas, N. (2021). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Di Desa Arangkaa) Kecamatan Gemeh Kabupaten Talaud. *GOVERNANCE*, 1(2).

- Manting, L., & Sudarwanto, P. B. (2020). The Implementasi Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pendidikan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Tangerang. *Jurnal Madani: Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Humaniora*, 3(2), 196-201.
- Mardhiah, A., Supriatno, S., & Djufri, D. (2016). Pengelolaan Hutan Berbasis Kearifan Lokal dan Pengembangan Hutan Desa di Mukim Lutueng Kecamatan Mane Kabupaten Pidie Provinsi Aceh. *BIOTIK: Jurnal Ilmiah Biologi Teknologi dan Kependidikan*, 4(2), 128-135.
- Markum., Ichsan, A. C., Rini, D. S., & Saputra, M. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Untuk Tata Kelola Kelembagaan dan Usaha Aren Pada Hutan Kemasyarakatan di Aik Bual Lombok Tengah. *Jurnal SIAR ILMUWAN TANI*, 1(2), 82-89.
- Muttaqin, S. H., Samsuudin, I., Subarudi, N., & Hamdani, F. A. U. (2017). Pemanfaatan jasa lingkungan di hutan desa Buntoi, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah. *Jurnal analisis kebijakan kehutanan*, 14(1), 1-16.
- Murti, H. A. (2018). Perhutanan Sosial bagi akses keadilan masyarakat dan pengurangan kemiskinan. *Jurnal Analis Kebijakan*, 2(2).
- Mutiah, A., Abdullah, A., & Nurlaelah, S. (2018). Identifikasi peranan kelompok sebagai wahana kerja sama pada kelompok peternak sapi potong pada peternakan rakyat. *Jurnal Agripet*, 18(1), 57-62.
- Nasution, A. P., & Handoko, B. (2018). Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah Dilingkungan Kecamatan Datuk Bandar Tanjung Balai. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik*, 8(2), 15-25.
- Nilasari, A., Murti Laksono, K., & Soetarto, E. (2017). Tipologi konflik kawasan hutan pada proses penataan batas di wilayah Pulau Bangka. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 5(3), 176-183.
- Qurniati, R., Duryat, D., & Kaskoyo, H. (2018). Penguatan kelembagaan pengelola hutan desa di sekitar Gunung Rajabasa Lampung. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sakai Sambayan*, 1(3), 80-86
- Rahayu, E. M., & Triwanto, J. (2021). Penyuluhan Perhutanan Sosial Di Kelompok Tani Hutan Kota Malang. *Budimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2).
- Republik Indonesia. (2019). Peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Evaluasi Izin Perhutanan Sosial. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

- Republik Indonesia. (2021). Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial. Jakarta: Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Rimbawati, D. E. M., Fatchiya, A., & Sugihen, B. G. (2018). Dinamika Kelompok Tani hutan agroforestry di Kabupaten Bandung. *Jurnal Penyuluhan*, 14(1), 92-103.
- Rodianor, F. O., Subagyo, A., & Satriadi, T. (2022). Tingkat Erosi Areal Rehabilitasi Das Kawasan Gunung Batu Kabupaten Tanah Laut. *In Prosiding Seminar Nasional Lingkungan Lahan Basah* (Vol. 7, No. 2).
- Salma., Umar, S., & Maiwa, A. (2020). Inisiatif Masyarakat Terhadap Pemanfaatan Hutan Desa Mire Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una. *Jurnal Warta Rimba*, 8(3), 205-213
- Samad, R. A. (2017). Rancangan Pemberdayaan Masyarakat Dalm Pengelolaan Hutan Desa Di Desa Bonto Marannu Kecamatan Ulu'Ere Kabupaten Bantaeng Sulawesi Selatan. *Skripsi*. Universitas Hasanuddin. Makassar
- Setiawan, D., Hardiansyah, G., & Widhanarto, G. O. (2021). Identifikasi Dampak Pengelolaan Hutan Desa Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Bentang Pesisir Padang Tikar Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kubu Raya. *Jurnal Hutan Lestari*, 9(4), 640-651.
- Sembiring, H. (2012). Analisis Pengaruh karakteristik perusahaan terhadap kelengkapan pengungkapan dalam laporan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal mediasi*, 4(01), 68-77.
- Siregar, S. P., Wanto, A., & Nasution, Z. M. (2018). Analisis Akurasi Arsitektur JST Berdasarkan Jumlah Penduduk Pada Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. *In Seminar Nasional Sains dan Teknologi Informasi (SENSASI)*, 1(1).
- Sukardi, S. (2017). Analisis Pendapatan Masyarakat Desa untuk Kelestarian Hutan Lindung (Studi Hutan Desa Pattaneteang Kabupaten Bantaeng). *Jurnal Hutan dan Masyarakat*, 44-53.
- Supmawati, S., & Ramli. (2019) Deskripsi Mata Pencapaian Masyarakat dan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Lagasa Kecamatan Duruka Kabupaten Muna. *Jurnal Penelitian Pendidikan Geografi*, 4(2).
- Sholihah, I., & Firdaus, Z. (2019). Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Pendidikan. *Al-Hikmah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 7(2), 33-46.
- Syah, R. F. (2019). Dinamika Politik Lokal Masyarakat Pinggiran: Fenomena Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan. *Al-Tatwir*, 4(1).

- Vinolina, N. S., Sipayung, A. M., & Pintauli, S. (2020). *Reforestation of 'Village Forest' to Improve Sustainability Creative Industries in Desa Sipunjot. ABDIMAS TALENTA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2), 714-722.
- Wardhana, A. W., Baharuddin, B., & Zainab, S. (2022). Sosialisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (Pnbp) Bagi Kelompok Tani Hutan Di Wilayah Kph Rinjani Barat. *J-ABDI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 1(10), 2843-2858.
- Yuristya, A. (2017). Keterkaitan pendidikan, perubahan sosial budaya, modernisasi dan pembangunan. *IJTIMAIYAH Jurnal Ilmu Sosial dan Budaya*, 1(1).
- Zulevi, X. F., & Adiwibowo, S. (2018). Pengaruh Partisipasi dalam Pengelolaan Hutan Nagari Simancuang terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]*, 2(1), 13-28.
- Zunnuaraeni & Zuhairi, A. (2018). Kewenangan Desa Dalam Pengelolaan Hutan Untuk Mitigasi Perubahan Iklim. *Jurnal IUS*, 6(1), 3

L

A

M

P

I

R

A

N

Lampiran 1. Kuosioner Evaluasi Hutan Desa

A. Aspek Produksi/Ekonomi

1. Kriteria Tata Kelola Sumber Daya Hutan

Indikator	Bobot	Skor	Hasil penilaian	Penjelasan kondisi terkini
1. Tanda batas areal kerja perhutanan sosial dengan wilayah kelola/pemanfaatan disekitarnya	10			
a. Ada batas di semua areal kerja		3		
b. Ada, tapi tidak semua areal kerja		2	20	
c. Tidak ada batas		1		
2. Peta areal kerja, yang sudah terbagi dalam zonasi dan/atau blok	9			
a. Ada peta dan sudah ditanda tangani ketua lembaga		3	27	
b. Ada peta, tapi belum selesai		2		
c. Tidak ada peta				
3. Peralihan hak kelola/izin areal kerja kepada pihak lain	10			
a. Tidak ada peralihan hak/izin		3	30	
b. Ada peralihan hak/izin		1		
4. Penerapan sistem wanatani yang adaptif dan sesuai dengan kondisi setempat	8			
a. Menerapkan		3	24	
b. Tidak menetapkan		1		
5. Penggunaan teknologi pengelolaan atau pemanfaatan hutan yang ramah lingkungan.	6			
a. Menggunakan di seluruh areal kerja PS		3		
b. Menggunakan hanya di sebagian areal kerja PS		2	12	
c. Tidak ada yang menggunakan		1		

Indikator	Bobot	Skor	Hasil penilaian	Penjelasan kondisi terkini
6. Realisasi penanaman/pemeliharaan/ perlindungan tanaman sesuai rencana kerja	10			
a. 81 % s/d 100 %		3		
b. 61 % s/d 80 %		2		
c. 0 s/d 60 %		1	10	
7. Laporan tahunan dari pemegang izin/hak kelola hutan kepada pejabat terkait	10			
a. Ada laporan tahunan		3	30	
b. Tidak ada laporan tahunan		1		
Total nilai (1 s/d 7)			153	

2. Kriteria Tata Kelola Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan jasa Lingkungan

Indikator	Bobot	Skor	Hasil penilaian	Penjelasan kondisi terkini
1. Realisasi kegiatan pemanfaatan dan/atau pemungutan hasil hutan kayu (HHK) yang sesuai dengan rencana kerja.	10			
a. 81 % s/d 100 %		3		
b. 61 % s/d 80 %		2		
c. 0 % s/d 60 %		1	10	
2. Realisasi kegiatan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) dan jasa lingkungan, termasuk didalamnya pemanfaatan tumbuhan bawah tegakan, ekowisata dan/atau perdagangan karbon yang sesuai dengan rencana kerja.	10			
a. 81 % s/d 100 %		3		
b. 61 % s/d 80 %		2		
c. 0 % s/d 60 %		1	10	
3. Pemenuhan kewajiban pembayaran pendapatan negara bukan pajak/PNBP,	10			

Indikator	Bobot	Skor	Hasil penilaian	Penjelasan kondisi terkini
seperti biaya ijin usaha pemanfaatan dan provisi sumberdaya hutan.				
a. Selalu membayar		3		
b. Pernah membayar, tapi tidak selalu		2		
c. Tidak pernah membayar		1	10	
Total Nilai (1 s/d 3)			30	

3. Kriteria Usaha Ekonomi Hasil Hutan

Indikator	Bobot	Skor	Hasil penilaian	Penjelasan kondisi terkini
1. Unit usaha perhutanan sosial yang sudah berjalan.	8			
a. Ada unit usaha dan berjalan		3	24	
b. Ada unit usaha, tetapi belum berjalan		2		
c. Tidak ada kelembagaan usaha		1		
2. Sumberdaya untuk menjalankan usaha perhutanan social. (aset, modal, dan kemitraan)	6			
a. Memiliki aset, modal dan kemitraan		3		
b. Memiliki 2 diantara aset, modal dan kemitraan		2	12	
c. Tidak memiliki aset, modal dan kemitraan		1		
3. Rencana usaha dan laporan perkembangan pelaksanaannya.	6			
a. Adanya rencana usaha.		3	18	
b. Ada rencana usaha, tetapi tidak ada laporan pelaksanaannya		2		
c. Tidak ada rencana usaha		1		
4. Pengelolaan sistem informasi manajemen dan pemasaran	6			
a. Ada sistem informasi		3		

Indikator	Bobot	Skor	Hasil penilaian	Penjelasan kondisi terkini
managemen dan pemasaran				
b. Ada sistem informasi managemen atau pemasaran		2		
c. Tidak ada sistem informasi managemen dan pemasaran		1	6	
5. Akses pasar dalam pemasaran produk HHK/HHBK	6			
a. Internasional/Ekspor		3		
b. Provinsi		2		
c. Kabupaten/Lokal		1	6	
6. Jasa Lingkungan ekowisata	6			
a. Wisatawan Manca Negara		3		
b. Wisatawan Domestik		2		
c. Wisatawan Lokal		1	6	
7. Jasa lingkungan pemanfaatan air	6			
a. Ada dimanfaatkan secara komersil		3		
b. Ada dimanfaatkan sendiri (non komersil)		2	12	
c. Tidak ada		1		
8. Jasa lingkungan pemanfaatan karbon	6			
a. Sudah diperdagangkan		3		
b. Sudah siap diperdagangkan		2		
c. Tidak ada		1	6	
Total nilai (1 s/d 8)			90	

B. Aspek Ekologi

1. Kriteria fungsi kawasan hutan dapat dipertahankan sesuai peruntukannya

Indikator	Bobot	Skor	Hasil penilaian	Penjelasan kondisi terkini
1. Luasan tutupan hutan (untuk hutan lindung)	10			
a. Seluas lebih dari 80 %		3	30	
b. Seluas antara 61 % s/d 80 %		2		
c. 0 % - 60 %		1		

Indikator	Bobot	Skor	Hasil penilaian	Penjelasan kondisi terkini
2. Luasan tutupan hutan (untuk hutan produksi)	10			
a. Seluas lebih dari 80 %		3		
b. Seluas antara 61 % s/d 80 %		2		
c. 0 % - 60 %		1		
3. Tanaman pokok kehutanan	10			
a. Lebih dari 80 %		3	30	
b. Antara 61 % s/d 80 %		2		
c. 0 % s/d 60 %		1		
4. Pola budidaya perhutanan sosial	10			
a. Kombinasi Agroforestry (pertanian, ternak dan/atau ikan)		3		
b. Agroforestry		2	20	
c. Monokulture		1		
Total nilai (1 s/d 4)			80	

2. Kriteria Keanekaragaman jenis dan produk sumberdaya hutan terjaga / meningkat

Indikator	Bobot	Skor	Hasil penilaian	Penjelasan kondisi terkini
1. Jumlah dan keragaman jenis tanaman dan satwa	6			
a. Jumlah dan keragaman bertambah.		3		
b. Jumlah dan keragaman tetap		2	12	
c. Jumlah dan keragaman berkurang		1		
2. Keberadaan spesies endemic terjaga	5			
a. Terjaga		3		
b. Berkurang		2		
c. Punah/tidak ditemukan		1	5	
Total Nilai (1 s/d 2)			17	

3. Perbaikan kondisi hidrologis

Indikator	Bobot	Skor	Hasil penilaian	Penjelasan kondisi terkini
1. Sumber mata air di areal PS atau debit aliran sungai yang berada atau melewati kawasan perhutanan social	7			

Indikator	Bobot	Skor	Hasil penilaian	Penjelasan kondisi terkini
a. Jumlah mata air bertambah atau tetap		3	21	
b. Jumlah mata air tetap, tetapi debit airnya menurun		2		
c. Jumlah mata air dan debit air menurun		1		
2. Mutu air yang bersumber dari mata air	7			
a. Mutu air terjaga dan mutu airnya semakin baik		3	21	
b. Mutu air terjaga, tetapi mutu air semakin buruk.		2		
c. Kualitas air hilang		1		
Total nilai (1 s/d 2)			42	

4. Perlindungan hutan

Indikator	Bobot	Skor	Hasil penilaian	Penjelasan kondisi terkini
1. Keberadaan unit pengamanan hutan yang aktif menjalankan aktivitasnya (patroli rutin, pertemuan, dan lain-lain)	8			
a. Ada dan aktif melakukan patrol dan kegiatan pengamanan hutan.		3	24	
b. Ada, tetapi tidak aktif.		2		
c. Tidak ada.		1		
2. Kegiatan pencegahan/penanganan kebakaran lahan dan hutan	8			
a. Ada, rutin		3	24	
b. Ada, tidak rutin		2		
c. Tidak ada		1		
3. Kegiatan pemeliharaan dan perlindungan hutan (pencegahan/penanganan hama dan penyakit tanaman, penebangan liar, dll)	7			
a. Ada, rutin		3	21	
b. Ada, tidak rutin		2		

Indikator	Bobot	Skor	Hasil penilaian	Penjelasan kondisi terkini
c. Tidak ada		1		
4. Aturan internal atau standar operation procedur (SOP) perlindungan hutan.	6			
a. Ada, berjalan		3		
b. Ada, tidak berjalan		2		
c. Tidak ada		1	6	
Total nilai (1 s/d 4)			75	

C. Aspek Sosial

1. Kriteria peningkatan kesejahteraan Kelompok/masyarakat/desa

Indikator	Bobot	Skor	Hasil Penilaian	Penjelasan kondisi terkini
1. Peningkatan pendapatan anggota kelompok/lembaga yang terlibat dalam pengelolaan/pemanfaatan hutan.	10			
a. Pendapatan meningkat		3		
b. Pendapatan tetap		2		
c. Pendapatan menurun		1		
2. Peningkatan jumlah tenaga kerja dan lapangan kerja	9			
a. Pendapatan meningkat		3		
b. Pendapatan tetap		2		
c. Pendapatan menurun		1		
Total nilai (1 s/d 2)				

2. Kriteria penguatan kelembagaan

Indikator	Bobot	Skor	Hasil Penilaian	Penjelasan kondisi terkini
1. Status badan hukum lembaga pemegang ijin/hak kelola	5			
a. Koperasi/BUMDes		3		
b. Kelompok/gapoktan berakte notaris		2		
c. Kelompok/gapoktan		1		
2. Pemegang ijin/hak kelola hutan memiliki aturan dan mekanisme kelembagaan yang disepakati bersama.	10			

Indikator	Bobot	Skor	Hasil Penilaian	Penjelasan kondisi terkini
a. Memiliki		3		
b. Tidak memiliki		1		
3. Pertemuan rutin pengurus dan kegiatan lembaga	8			
a. Sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan		3		
b. Sekali dalam 3 bulan ini.		2		
c. Tidak pernah ada pertemuan pengurus selama 6 bulan terakhir		1		
4. Tingkat partisipasi pengurus dan anggota pemegang izin/hak kelola dalam proses pembuatan kebijakan organisasi dan implementasi program kerja	8			
a. Melibatkan pengurus dan anggota		3		
b. Hanya melibatkan pengurus		1		
5. Adanya kegiatan peningkatan kapasitas (pelatihan, lokakarya, dll) baik dilakukan secara mandiri maupun bekerjasama dengan pihak lain.	8			
a. Ada kegiatan setidaknya 2 kali setiap tahun		3		
b. Ada kegiatan sekali setiap tahun		2		
c. Tidak ada kegiatan		1		
6. Keberadaan asset (modal, peralatan, tempat usaha, tanaman hutan, kendaraan, dll) lembaga pemegang izin/hak kelola yang meningkat dari tahun ke tahun.	8			
a. Semakin bertambah		3		
b. Tetap		2		
c. Berkurang		1		
Tidak memiliki asset				
7. Adanya iuran/tabungan pemegang izin/hak kelola	6			

Indikator	Bobot	Skor	Hasil Penilaian	Penjelasan kondisi terkini
hutan				
a. Ada iuran/tabungan dan masih aktif		3		
b. Ada iuran/tabungan, tetapi tidak aktif		2		
c. Tidak ada iuran/tabungan.		1		
8. Ketersediaan daftar anggota dan struktur umur anggota lembaga pemegang ijin/hak kelola hutan	8			
a. Ada		3		
b. Tidak ada		1		
Total nilai (1 s/d 8)				

3. Kriteria perubahan perilaku pengurus dan anggota pemegang ijin/hak kelola

Indikator	Bobot	Skor	Hasil Penilaian	Penjelasan kondisi terkini
1. Munculnya tokoh/kader baru	7			
a. Ada		3		
b. Tidak ada		1		
2. Perubahan perilaku pengurus dan anggota dari yang eksploitatif menjadi membangun hutan.	7			
a. 80 - 100 %		3		
b. 60 - 79 %		2		
c. 0 – 59 %		1		
Total nilai (1 s/d 2)				

4. Kriteria Resolusi Konflik

Indikator	Bobot	Skor	Hasil Penilaian	Penjelasan kondisi terkini
1. Keberadaan aturan internal dan prosedur penyelesaian konflik.	8			
a. Ada		3		
b. Tidak ada		1		
2. Pengalaman dalam proses penyelesaian konflik dan/atau sengketa.	7			
a. Tidak ada konflik		3		
b. Ada pengalaman menyelesaikan konflik dan dapat diselesaikan		2		

Indikator	Bobot	Skor	Hasil Penilaian	Penjelasan kondisi terkini
c. Ada konflik, tapi belum selesai.		1		
Total nilai (1 s/d 2)				

5. Sensitivitas Gender

Indikator	Bobot	Skor	Hasil Penilaian	Penjelasan kondisi terkini
1. Keterwakilan perempuan dalam pengurus lembaga pemegang ijin/hak kelola hutan	8			
a. Ada perwakilan		3		
b. Tidak ada perwakilan		1		
2. Tingkat partisipasi pengurus dan anggota perempuan dalam kegiatan lembaga dan pengelolaan/pemanfaatan hutan	8			
a. Aktif terlibat dalam proses mengambil keputusan lembaga dan menerima manfaat kegiatan		3		
b. Sebatas ikut pertemuan, meskipun menerima manfaat		2		
c. Tidak dilibatkan dalam proses mengambil keputusan lembaga		1		
Total nilai (1 s/d 2)				

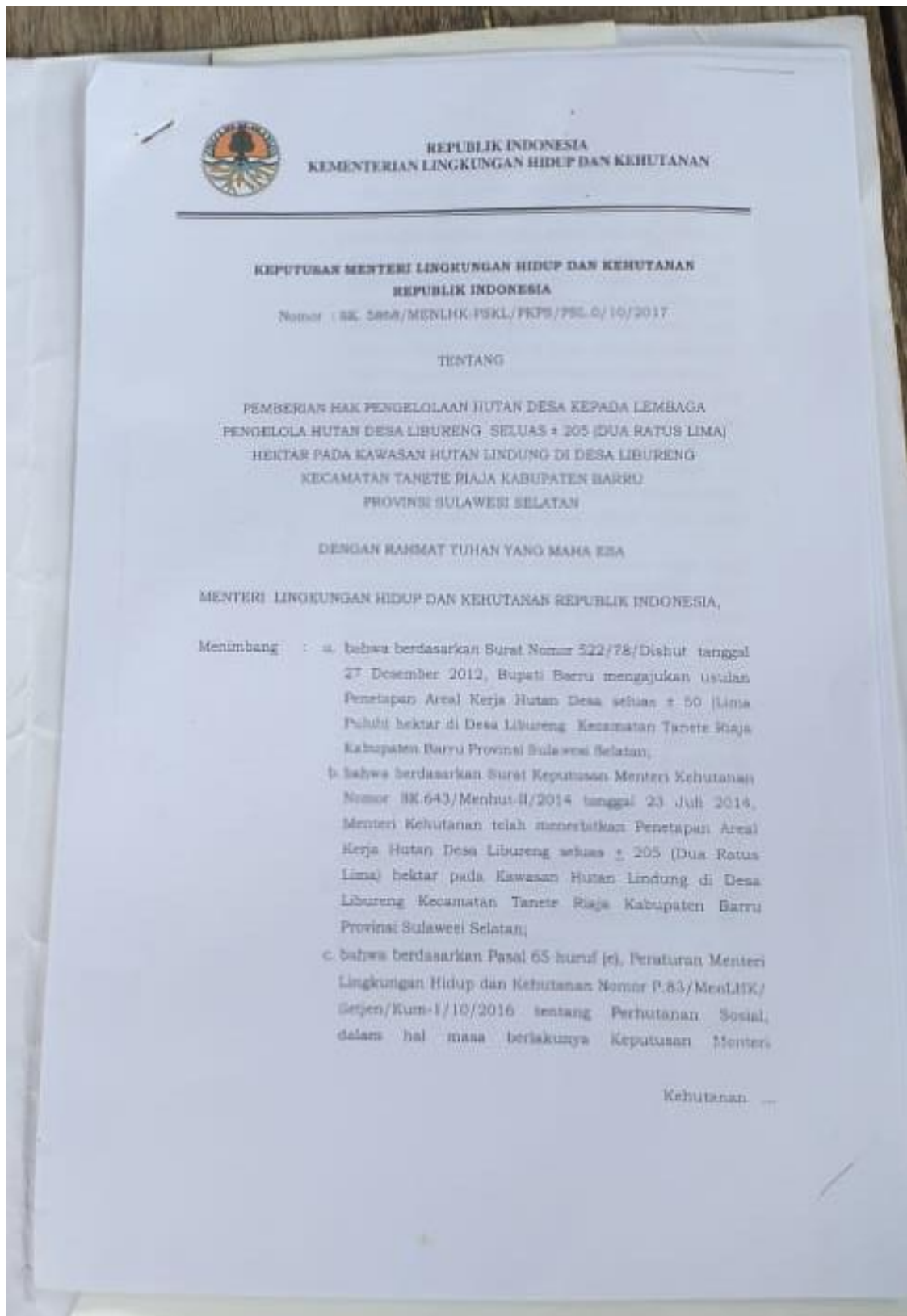
6. Kriteria kontribusi pengelolaan hutan terhadap pihak terkait

Indikator	Bobot	Skor	Hasil Penilaian	Penjelasan kondisi terkini
1. Adanya dana/bantuan dari pengelola hutan yang disumbangkan untuk kegiatan pembangunan desa	8			
a. Ada		3		
b. Tidak ada		1		
2. Adanya relationship antara pengelola hutan dan pihak terkait lainnya	8			
a. Ada		3		
b. Tidak ada		1		
Total nilai (1 s/d 2)				

Lampiran 2. Penilaian Umum evaluasi perhutanan sosial berdasarkan kriteria

Aspek dan kriteria	Nilai tertinggi	Hasil penilaian	Persentase (%)	Kategori penilaian
A. Aspek Produksi/Ekonomi	429			
1. Tata Kelola sumberdaya hutan	189			
2. Tata kelola hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan	90			
3. Tata Usaha Hasil Hutan	150			
B. Aspek Ekologi	252			
1. Fungsi dan status kawasan hutan dapat dipertahankan sesuai peruntukannya	90			
2. Keanekaragaman jenis dan produk sumberdaya hutan terjaga/meningkat	33			
3. Perbaikan kondisi hidrologis	42			
4. Perlindungan hutan	87			
C. Aspek Sosial	405			
1. Peningkatan kesejahteraan kelompok/masyarakat/desa	57			
2. Penguatan kelembagaan	183			
3. Perubahan perilaku pengurus dan anggota pemegang izin/hak kelola	42			
4. Resolusi konflik	45			
5. Sensitivitas Gender	48			
6. Kontribusi pengelolaan hutan terhadap desa/masyarakat	30			
Total nilai tertinggi & hasil penilaian	1.086			

Lampiran 3. Surat Keputusan Pemberian Pengelolaan Hutan Desa Libureng



Perhutanan Sosial, Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan Keputusan tentang Pemberian Hak Pengelolaan Hutan Desa:

- h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g, perlu diterbitkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pemberian Hak Pengelolaan Hutan Desa Kepada Lembaga Pengelola Hutan Desa Libureng seluas ± 205 (Dua Ratus Lima) hektar, berada pada kawasan Hutan Lindung (HL) di Desa Libureng Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696)

sebagaimana...

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
 5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 713);
 6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.14/ Menlhk/ Setjen/ OTL.0/ 1/ 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 210);
 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MenLHK/Setjen/Kum-1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN HAK PENGELOLAAN HUTAN DESA KEPADA LEMBAGA PENGELOLA HUTAN DESA LIBURENG SELUAS ± 205 (DUA RATUS LIMA) HEKTAR PADA KAWASAN HUTAN LINDUNG DI DESA LIBURENG KECAMATAN TANETE RIAJA KABUPATEN BARRU PROVINSI SULAWESI SELATAN.

KESATU...

- KESATU : Memberikan Hak Pengelolaan Hutan Desa kepada Lembaga Pengelola Hutan Desa Libureng di wilayah administrasi Desa Libureng Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan seluas ± 205 (Dua Ratus Lima) Hektar, berada pada kawasan Hutan Lindung (HL) dengan susunan pengurus sebagaimana lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Letak dan batas Hak Pengelolaan Hutan Desa sebagaimana dimaksud pada Amar KESATU adalah sebagaimana tergambar pada lampiran Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Pemberian Hak Pengelolaan Hutan Desa sebagaimana dimaksud pada Amar KESATU dengan ketentuan :
1. Hak Pengelolaan Hutan Desa tidak dapat diwariskan;
 2. Hak Pengelolaan Hutan Desa bukan merupakan hak kepemilikan atas kawasan hutan;
 3. Hak Pengelolaan Hutan Desa dilarang dipindah tangankan;
 4. Hak Pengelolaan Hutan Desa tidak boleh mengubah status dan fungsi kawasan hutan;
 5. Hak Pengelolaan Hutan Desa dilarang digunakan untuk kepentingan lain diluar rencana usaha pemanfaatan;
 6. Hak Pengelolaan Hutan Desa tidak dapat diagunkan kecuali tanamannya;
 7. Dilarang menanam sawit di areal Hak Pengelolaan Hutan Desa.
- KEEMPAT : Hak Pengelolaan Hutan Desa sebagaimana Amar KESATU, meliputi:
1. Usaha pemanfaatan kawasan;
 2. Usaha pemungutan dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu; dan
 3. Usaha...

3. Usaha pemanfaatan jasa lingkungan;

- KELIMA : Setelah diberikan Hak Pengelolaan Hutan Desa, Lembaga Pengelola Hutan Desa Libureng berhak:
1. mendapat perlindungan dari gangguan perusakan dan pencemaran lingkungan atau pengambilalihan secara sepihak oleh pihak lain;
 2. melaksanakan usaha pemanfaatan sebagaimana Amanat KEEMPAT sesuai dengan kearifan lokal antara lain sistem usaha tani terpadu;
 3. mendapat manfaat dari sumber daya genetik yang ada di dalam areal Hak Pengelolaan Hutan Desa;
 4. mengembangkan ekonomi produktif berbasis kehutanan;
 5. mendapat pendampingan dalam pengelolaan Hutan Desa serta penyelesaian konflik;
 6. mendapat pendampingan kemitraan dalam pengembangan usahanya;
 7. mendapat pendampingan penyusunan rencana pengelolaan hutan desa dan rencana kerja tahunan hak pengelolaan hutan desa; dan
 8. mendapat perlakuan yang adil atas dasar gender ataupun bentuk lainnya.

- KEENAM : Setelah diberikan Hak Pengelolaan Hutan Desa, Lembaga Pengelola Hutan Desa Libureng berkewajiban:
1. menjaga arealnya dari perusakan dan pencemaran lingkungan;
 2. memberi tanda batas areal kerjanya;
 3. menyusun Rencana Pengelolaan Hutan Desa (RPHD) dan Rencana Kerja Tahunan Hak Pengelolaan Hutan Desa (RKTHPHD);

4. menyampaikan...

4. menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan Hutan Desa kepada pemberi Hak Pengelolaan Hutan Desa;
5. melakukan penanaman dan pemeliharaan hutan di areal kerja Hak Pengelolaan Hutan Desa;
6. melaksanakan tata usaha hasil hutan;
7. membayar provisi sumber daya hutan;
8. mempertahankan fungsi hutan; dan
9. melaksanakan perlindungan hutan.

KETUJUH : Semua usaha pemanfaatan dan atau pemungutan hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam amar ke KEEMPAT perlu dilakukan pengaturan pengelolaan hutan secara lestari yang dituangkan dalam RPHD dan RKTHPHD dengan memperhatikan pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan.

KEDELAPAN : Hak Pengelolaan Hutan Desa diberikan untuk jangka waktu 35 (tiga puluh lima) tahun dan dievaluasi setiap 5 (lima) tahun.

KESEMBILAN : Apabila pemegang Hak Pengelolaan Hutan Desa di Desa Libureng melanggar hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Amar KELIMA dan KEENAM dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/Menlhk/Setjen/Kum-1/2016 tentang Perhutanan Sosial.

KESEPULUH...

Lampiran 4. Daftar Nama Anggota dan Pengurus LPHD Libureng

DAFTAR ANGGOTA DAN PENGURUS LPHD DESA LIBURENG DI DESA LIBURENG, KECAMATAN TANERTE RIJAJA, KABUPATEN BARRU PROVINSI SULAWESI SELATAN							
No	Nama	NIK	Nomor KK	Jenis Kelamin	Alamat	Pekerjaan	Keterangan
1	ISMAIL	"731101260720001	"7311010905120006	LAKI - LAKI	ULO	PETANI	
2	KASIR	"731101260720001	"7311012806120002	LAKI - LAKI	PANINCONG	PETANI	KETUA
3	NURZAKIAH	"7311014104790002	"7311011701110007	PEREMPUAN	ULO	PETANI	WAKIL KETUA
4	JASMIN BACO	"7311012610800001	"7311011411130002	LAKI - LAKI	ULO	MRT	SEKRETARIS
5	MUH. ARIF	"7311011702710001	"7311011506120031	LAKI - LAKI	ULO	WIRASWATA	BENDAHARA
6	FEBRIANTO	"7311012302850002	"7311012206120011	LAKI - LAKI	ULO	PETANI	ANGGOTA
7	HARISMAN	"7311013011690001	"7311011701110000	LAKI - LAKI	ULO	PETANI	
8	LA MASE	"7311010808550001	"7311010909160001	LAKI - LAKI	ULO	PETANI	
9	AKMAL	"7311011610810001	"7311010606110001	LAKI - LAKI	ULO	PETANI	
10	MADE UMAR	"7311013108630001	"7311012605110008	LAKI - LAKI	ULO	PETANI	
11	NURDIN	"7311010108650003	"7311012206120002	LAKI - LAKI	ULO	PETANI	
12	YANTAMAS	"7311010610670001	"7311010905120002	LAKI - LAKI	ULO	PETANI	
13	JAHARUDDIN	"7311012005920001	"7311010404110003	LAKI - LAKI	ULO	PETANI	
14	MAHYUDDIN	"7311011510630003	"7311011206120001	LAKI - LAKI	ULO	PETANI	
15	AKSAN	"7311013112640014	"7311011307120002	LAKI - LAKI	ULO	PETANI	
16	IBRAHIM KEDI	"7311010104730001	"7311012205120001	LAKI - LAKI	ULO	PETANI	
17	SYARIFUDDIN	"7311011708630002	"7311012901052323	LAKI - LAKI	ULO	PETANI	
18	ASRI BIN LASEMMANG	"7311013108710001	"7311012207130011	LAKI - LAKI	ULO	PETANI	
19	KARMAN	"7311011108650001	"7311013005110005	LAKI - LAKI	ULO	PETANI	
20	ABU BAKAR	"7311011211720002	"7311011904120001	LAKI - LAKI	ULO	PETANI	
21	BADIU	"7311010101530011	"7311011406120020	LAKI - LAKI	ULO	PETANI	
22	SULAEMAN	"7311010707520001	"7311010606110006	LAKI - LAKI	ULO	PETANI	
23	BAHARUDDIN	"7311012303660001	"7311011206120020	LAKI - LAKI	ULO	PETANI	
24	SUKRI	"7311012711140002	"7311011004070670	LAKI - LAKI	ULO	PETANI	
25	HERMAWANGSA	"6409011205800008	"7311012609110002	LAKI - LAKI	ULO	PETANI	
26	IWAN NASIR	"6471022407690002	"7311010708170003	LAKI - LAKI	ULO	PETANI	
27	RAHMATULLAH	"7311010112760001	"7311010506070018	LAKI - LAKI	ULO	PETANI	
28	AHMAD RUDI	"7311010108610002	"7311011905110000	LAKI - LAKI	ULO	PETANI	
29	MUH. YUNUS	"7311010105510001	"7311012901052699	LAKI - LAKI	ULO	PURNABAKTI	
30	AMIRUDDIN	"7311012507730002	"7311010810100006	LAKI - LAKI	PANINCONG	PNS	
31	H. MUDE	"7311011507560001	"7311012901052341	LAKI - LAKI	ULO	PETANI	
32	SAPRUDDIN	"7311012406810001	"7311012901052305	LAKI - LAKI	ULO	PETANI	
33	H.MUH.BASRI,S.Pd	"7311011208620001	"7311012901052318	LAKI - LAKI	ULO	PNS	
34	USMAN THALIB	"7311010701710001	"731101095110002	LAKI - LAKI	CEMPAE	PETANI	
35	TAHIR	"7311012312760001	"7311011008170002	LAKI - LAKI	CEMPAE	PETANI	
36	DAHRI	"7311010310650002	"7311011506120030	LAKI - LAKI	CEMPAE	PETANI	
37	MASKUR	"7311010202890002	"7311010801110006	LAKI - LAKI	CEMPAE	PETANI	
38	AHMAD EFENDI	"7311012602910003	"7311012901052897	LAKI - LAKI	CEMPAE	PETANI	
39	M. RIJAL B. AKMAL	"7311012311970001	"7311011506120028	LAKI - LAKI	CEMPAE	PETANI	
40	ABD SAMAD	"7311010708530001	"73110112901052637	LAKI - LAKI	CEMPAE	PETANI	
41	H.SAHARUDDIN SUNRE	"7311011003570002	"7311012706120012	LAKI - LAKI	CEMPAE	PURNABAKTI	
42	ASRI	"7311010708700003	"7311012901052897	LAKI - LAKI	CEMPAE	PETANI	
43	MOH. AKSA	"7311010101750022	"7311010310170001	LAKI - LAKI	CEMPAE	PETANI	
44	SYAMSUDDIN	"7311013112830004	"7311012608140001	LAKI - LAKI	CEMPAE	PETANI	
45	SIDERU	"7311013112540021	"7311012506120004	LAKI - LAKI	CEMPAE	PETANI	
46	ASMI, S.Pd	"6405021308850004	"7311013009160001	LAKI - LAKI	CEMPAE	WIRASWATA	
47	SUFIRMAN	"7311011505020002	"7311011406120004	LAKI - LAKI	CEMPAE	PETANI	
48	ABD. ZAMAN	"7311031507750002	"73110112901052637	LAKI - LAKI	PANINCONG	PETANI	
49	SAKKA	"7311013112770001	"7311012901053363	LAKI - LAKI	PANINCONG	PETANI	
50	SUDIRMAN	"7311010312840002	"7311012305170005	LAKI - LAKI	PANINCONG	PETANI	
51	SIHARUDDIN	"7311010707760002	"7311012907110003	LAKI - LAKI	PANINCONG	PETANI	
52	LA HAME	"7311011507550002	"7311011108110005	LAKI - LAKI	PANINCONG	PETANI	
53	JAMALUDDIN	"7311010108670003	"7311010806110014	LAKI - LAKI	PANINCONG	PETANI	
54	DARMAWANGSA	"7311010802940001	"7311011312070002	LAKI - LAKI	PANINCONG	PETANI	
55	MUH. TAHAN	"7311011703780002	"7311011511100014	LAKI - LAKI	PANINCONG	PETANI	
56	KAMARUDDIN	"7311010110860001	"7311012105110007	LAKI - LAKI	PANINCONG	PETANI	
57	RIZAL	"7311010202690005	"731101004070882	LAKI - LAKI	PANINCONG	PETANI	
58	ABD. ARIF	"7311013112550026	"7311013105110002	LAKI - LAKI	PANINCONG	PETANI	
59	ABD. AZIZ	"731101140878000173	"7311011809170002	LAKI - LAKI	PANINCONG	PETANI	
60	RAHMAN	"73110101056600081	"7311012901053382	LAKI - LAKI	PANINCONG	PETANI	
61	ANTO	"7311013108840000	"7311010606120006	LAKI - LAKI	PANINCONG	PETANI	
62	LAJIDING	"7312013112660086	"7311011502160003	LAKI - LAKI	PANINCONG	PETANI	
63	SURAHMAN	"7311011503780001	"7311011605120011	LAKI - LAKI	PANINCONG	PETANI	
64	HAMSA	"7311010107730001	"7311010406110004	LAKI - LAKI	PANINCONG	PETANI	
65	MUSTADIR	"7311010107800012	"7311010709120019	LAKI - LAKI	PANINCONG	PETANI	
66	AGUS RAHMAN	"7311011508720006	"7311011107120001	LAKI - LAKI	PANINCONG	PETANI	
67	HASAN	"7311013101700002	"7311012911100007	LAKI - LAKI	PANINCONG	PETANI	
68	RIDWAN	"7311010806740001	"7311011109170007	LAKI - LAKI	PANINCONG	PETANI	
69	BAHAR	"7311013008600003	"7311012706110008	LAKI - LAKI	PANINCONG	PETANI	
70	NUR ARDI	"7311010209910001	"7311011012180006	LAKI - LAKI	PANINCONG	PETANI	
71	AHMAD	"6474021010670008	"7311012107160002	LAKI - LAKI	PANINCONG	PETANI	
72	SAPAR YUNARSI	"6471021212760008	"7311010804190002	LAKI - LAKI	PANINCONG	PETANI	
73	BAHRI	"7311010212730001	"7311012704120006	LAKI - LAKI	PANINCONG	PETANI	
74	RUSTAN	"7311010412760003	"7311010404140003	LAKI - LAKI	PANINCONG	PETANI	
75	LASINA	"7311033112800013	"7311011510140002	LAKI - LAKI	PANINCONG	PETANI	
76	MASUARA	"7311017112340002	"7311012906120001	PEREMPUAN	PANINCONG	MRT	
77	DAHLAN	"7311010406800001	"7311012906120002	LAKI - LAKI	PANINCONG	PETANI	
78	ADAM MALIK	"7311010402750002	"7311013004180009	LAKI - LAKI	PANINCONG	PETANI	
79	ALEX	"7311010302840002	"7311012307180002	LAKI - LAKI	PANINCONG	PETANI	
80	AHMAD	"7311010101540007	"7311012901053367	LAKI - LAKI	PANINCONG	PETANI	
81	ALIP ASWANDI	"7311012810990002	"7311010406110005	LAKI - LAKI	PANINCONG	PETANI	

87	ALIMIN B. RAUF	"7311010101690007	"7311011605120009	LAKI - LAKI	PANINCONG	PETANI	
88	HAMID	"7311013112520037	"7311010304140001	LAKI - LAKI	PANINCONG	PETANI	
89	UMAR	"7311010101530005	"7311010211100003	LAKI - LAKI	PANINCONG	PETANI	
90	SILA	"7311012709500001	"7311012901053357	LAKI - LAKI	PANINCONG	PETANI	
91	DARWIS	"7311013112500045	"7311012816120014	LAKI - LAKI	PANINCONG	PETANI	
92	ANTANG	"7311010101780003	"7311011604140001	LAKI - LAKI	PANINCONG	PETANI	
93	H.JAMAING	"7314111205550001	"7311011604200004	LAKI - LAKI	PANINCONG	PETANI	
94	BACO ERE	"7311010107470014	"7311012901053362	LAKI - LAKI	PANINCONG	PETANI	
95	DIRFAN	"7311010501800002	"7311012006110006	LAKI - LAKI	PANINCONG	PETANI	
96	MANSYUR. S	7311010602690001	"7311012306120015	LAKI - LAKI	PANINCONG	PETANI	
97	SALAMA	"7311010302600001	"7311012006110001	LAKI - LAKI	PANINCONG	PETANI	
98	DAMRA	"7302012102770003	"7311012901053587	LAKI - LAKI	PANINCONG	PETANI	
99	MIDDING	"7311011912810001	"7311012901053203	LAKI - LAKI	PANINCONG	PETANI	
100	LADANRENG	"7311010101550004	"7311012901053622	LAKI - LAKI	PANINCONG	PETANI	
101	BASRI	"7311010512500002	"7311012901053587	LAKI - LAKI	PANINCONG	PETANI	

Lampiran 5. Surat Keputusan Pembentukan Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)



KABUPATEN BARRU
KEPUTUSAN KEPALA DESA LIBURENG
NOMOR : 24 TAHUN 2020

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK USAHA PERHUTANAN SOSIAL (KUPS)
LEMBAGA PENGELOLA HUTAN DESA LIBURENG
DESA LIBURENG KECAMATAN TANETE RIAJA

KEPALA DESA LIBURENG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 1 ayat 4 Peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Nomor: P.3/PSKL/SET/KUM.1/4/2016 Jo. P.9/PSKL/SET/PSL.2/8/2016 tentang Pedoman Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial dimana bahwa Penetapan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) salah satunya adalah oleh Kepala Desa.
- b. Bahwa untuk kemajuan kegiatan pembangunan usaha perhutanan di Desa Libureng dalam rangka mendukung Hutan Desa (HD) dipandang perlu segera mengangkat dan menunjuk Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) pada Lembaga Pengelola Hutan Desa Libureng;
- c. Bahwa untuk maksud huruf b diatas, perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Desa Libureng.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaga Kehutanan Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) , sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016 Tentang Perhutanan Sosial;
3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 5868/Menlhk-PSKL-PKPS/PSL.0/10/2017 tanggal 30 Oktober 2017 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Hutan Desa kepada Lembaga Pengelola Hutan Desa "Libureng" Desa Libureng Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru;
4. Peraturan Direktur Jendral Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Nomor P.3/PSKL/SET/KUM.1/4/2016 Tentang Pedoman Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jendral PSKL No. P.9/ PSKL/SET/PSL.2/8/2016;

**BERITA ACARA
PEMBENTUKAN KELOMPOK USAHA PERHUTANAN SOSIAL (KUPS)
PADA LEMBAGA PENGELOLA HUTAN DESA LIBURENG
DESA LIBURENG KAB. BARRU**

Pada hari ini, Sabtu tanggal dua puluh lima bulan juli tahun dua ribu dua puluh, kami yang bertanda tangan di bawah ini menyepakati pembentukan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) pada Lembaga Pengelola Hutan Desa Libureng Desa Libureng dengan struktur organisasi berikut :

KETUA : ISMAIL MAHALA
SEKRETARIS : NURZAKIAH, S.I.PUST.
BENDAHARA : JASMIN BACO, S.I.PUST.

KUPS LAGOCENG (Gula Aren)

Ketua : Muh. Tahang
Sekretaris : Dahri
Bendahara : Jasmin Baco
Anggota : terlampir


KUPS LACANI (Madu)

Ketua : Maskur
Sekretaris : Aksan
Bendahara : Kasir
Anggota : terlampir

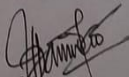
Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya dan apabila ada kekeliruan dalam kesepakatan dalam pembentukan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) ini akan dimusyawarahkan kembali.

Dibuat di : Desa Libureng
Pada Tanggal : 25 Juli 2020

Ketua LPHD Libureng


Ismail Mahala

Sekretaris LPHD Libureng


Nurzakiah, S.I.Pust.

Mengetahui :
Kepala Desa Libureng

H. Ikbal Basri

Lampiran 6. Dokumentasi Penelitian



Gambar 1. Diskusi dengan LPHD Libureng



Gambar 2. Wawancara dengan anggota KUPS



Gambar 3. Pertemuan dengan penyuluh LPHD Libureng



Gambar 4. Produk Gula Semut KUPS Lagoceng



Gambar 5. Peningkatan Kapasitas LPHD Libureng pengolahan umbi gadung



Gambar 6. Pembuatan Gula semut oleh KUPS Lagoceng



Gambar 7. Pengambilan umbi gadung

Lampiran 7. Identitas Anggota Kups Lagoceng

No.	Nama	Umur	Jenis Kelamin	Tingkat Pendidikan	Pekerjaan
1	Baharuddin	56	L	SD	Petani
2	Baco ere	65	L	SD	Petani
3	Syarifuddin	59	L	SD	Petani
4	Harisman	53	L	SMP	Petani
5	Sahli	57	L	SD	Petani
6	Jamaluddin	55	L	SD	Petani
7	Mappe	51	L	SMP	Petani

Lampiran 8. Biaya Tetap usaha gula semut

Biaya Tetap												
No. Responden	Tungku				Parang				Penyaringan			
	Harga (Rp)	Masa Pakai (Tahun)	Jumlah	Total (Rp)	Harga (Rp)	Masa Pakai (Tahun)	Jumlah	Total	Harga (Rp)	Masa Pakai (Tahun)	Jumlah	Total (Rp)
1	80.000	6	1	13.333	120.000	9	1	13.333	15.000	1	1	15.000
2	75.000	6	1	12.500	100.000	8	1	12.500	10.000	1	1	10.000
3	85.000	7	1	12.143	100.000	8	1	12.500	20.000	2	1	10.000
4	90.000	8	1	11.250	125.000	9	1	13.889	20.000	2	1	10.000
5	80.000	6	1	13.333	95.000	7	1	13.571	15.000	2	1	7.500
6	80.000	6	1	13.333	100.000	8	1	12.500	15.000	2	1	7.500
7	75.000	6	1	12.500	100.000	8	1	12.500	10.000	1	1	10.000

Kape Gagang Kayu				Loyang				Pengaduk Kayu				Total Biaya Tetap (Rp)
Harga (Rp)	Masa Pakai	Jumlah	Total	Harga (Rp)	Masa Pakai	Jumlah	Total	Harga (Rp)	Masa Pakai	Jumlah	Total	
15.000	2	1	7.500	15.000	4	4	15.000	20.000	5	1	4.000	68.167
15.000	3	1	5.000	15.000	4	4	15.000	15.000	5	1	3.000	58.000
15.000	2	1	7.500	17.000	5	5	17.000	25.000	6	1	4.167	63.310
15.000	2	1	7.500	15.000	5	4	12.000	20.000	5	1	4.000	58.639
15.000	2	1	7.500	12.000	4	5	15.000	20.000	5	1	4.000	60.905
15.000	3	1	5.000	12.000	4	5	15.000	20.000	4	1	5.000	58.333
15.000	2	1	7.500	10.000	4	4	10.000	15.000	4	1	3.750	56.250
Total												423.603
Rata-rata												60.515

Lampiran 9. Biaya Variabel Usaha Gula Semut

biaya variabel								
	bensin			kemiri				
No. Responden	Harga (Rp)	Jumlah (Liter)	Total	Harga (Rp)	Jumlah (Biji)	Total	Total Biaya Variabel (Rp/Bulan)	Total Biaya Variabel (Rp/Tahun)
1	10.000	4	40.000	500	50	25.000	65.000	780.000
2	10.000	5	50.000	500	50	25.000	75.000	900.000
3	10.000	5	50.000	500	90	45.000	95.000	1.140.000
4	10.000	6	60.000	500	90	45.000	105.000	1.260.000
5	10.000	4	40.000	500	50	25.000	65.000	780.000
6	10.000	4	40.000	500	50	25.000	65.000	780.000
7	10.000	4	40.000	500	50	25.000	65.000	780.000
	total						535.000	6.420.000
	rata-rata						76.429	917.143

Lampiran 10. Pendapatan Usaha Gula Semut.

No. Responden	Biaya Tetap (Rp/Tahun)	Biaya Variabel (Rp/Tahun)	Total Biaya (Rp/Tahun)	Total Produksi (Kg/Tahun)	Harga (Rp/Kg)	Total Penerimaan (Rp/Tahun)	Total Pendapatan (Rp/Tahun)
1	68.167	780.000	848.167	1.286	35.000	45.000.000	44.151.833
2	58.000	900.000	958.000	1.800	35.000	63.000.000	62.042.000
3	63.310	1.140.000	1.203.310	1.800	35.000	63.000.000	61.796.690
4	58.639	1.260.000	1.318.639	2.057	35.000	72.000.000	70.681.361
5	60.905	780.000	840.905	2.057	35.000	72.000.000	71.159.095
6	58.333	780.000	838.333	1.543	35.000	54.000.000	53.161.667
7	56.250	780.000	836.250	1.029	35.000	36.000.000	35.163.750
Total	423.603	6.420.000	6.843.603	11.571	245.000	405.000.000	398.156.397
Rata-Rata	60.515	917.143	977.658	1.653	35.000	57.857.143	56.879.485

Lampiran 11. Pendapatan Usaha Kacang

	Biaya Tetap	Biaya Variabel	Total Biaya (Rp/Tahun)	Total Produksi (Kg/Tahun)	Harga (Rp/Kg)	Total Penerimaan	Pendapatan
1	188.000	1.030.000	1.218.000	200	25.000	5.000.000	3.782.000
2	167.500	850.000	1.017.500	400	25.000	10.000.000	8.982.500
3	160.000	660.000	820.000	400	25.000	10.000.000	9.180.000
4	184.000	835.000	1.019.000	250	25.000	6.250.000	5.231.000
5	151.000	1.040.000	1.191.000	500	25.000	12.500.000	11.309.000
6	180.000	760.000	940.000	400	25.000	10.000.000	9.060.000
7	162.000	765.000	927.000	500	25.000	12.500.000	11.573.000
Total	1.192.500	5.940.000	7.132.500	2650		66.250.000	59.117.500
Rata-rata	170.357	848.571	1.018.929	378,57		9.464.286	8.445.357